



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 April 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULKIFLI ATJO
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 479849

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.150.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 496.000.000**

1. MOBIL, MERCEDES E 230 SEDAN Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SEDAN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. MOTOR, HONDA CBR 250 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 82.266.402**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.728.266.402**

III. HUTANG **Rp. 234.000.000**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

1.494.266.402

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **30 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.